

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom dalam mengelola sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat daerahnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam satu daerah terdapat pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah beserta dewan perwakilan rakyat daerah, hal tersebut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang berprinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah selain pemilik kebijakan juga mempunyai hak mengontrol setiap perkembangan di daerah masing - masing, yaitu menyangkut perkembangan dan kehidupan orang banyak. Sebagai pemegang kekuasaan memiliki peran penting untuk kemajuan daerahnya. Baik atau tidak pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan dampak pada berkembang ataupun tidaknya suatu daerah. Ada empat fungsi pemerintah berdasarkan Adam Smith dan Richard yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, pembangun serta pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan salah satunya adalah mengelola sumber daya yang ada, sumberdaya yang ada dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian.

Pemerintah daerah sebagai usaha meningkatkan perekonomian salahsatunya dengan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk kemakmuran masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebuah aktivitas usaha dimana mampu membuka lapangan pekerjaan menjadi lebih luas, melayani perekonomian secara luas kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan perekonomian, berperan dalam proses pemerataan , meningkatkan pendapatan masyarakat, dan dapat menjalankan perannya menjamin stabilitas nasional UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM.

UMKM disetiap daerah menghasilkan produk yang beraneka ragam, salahsatunya di Kabupaten Pati. Pati ialah kabupaten di Jawa Tengah dimana berbatasan dengan Kudus, Rembang, dan Jepara, adapun slogannya adalah Pati Bumi Mina Tani. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, jumlah UMKM pada tahun 2019 ada 8.472 UMKM. Untuk UMKM Batik berjumlah 26 dan tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Pati. Kecamatan Juwana, berlokasi di pesisir atau tepi pantai, usaha yang sering dijumpai ada kerajinan kuningan, bandeng, dan batik Bakaran. Dinamakan batik Bakaran karena dibuat di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah. Jumlah pengusaha batik di daerah ini berdasarkan data resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati ada 13 UMKM. Produksi Batik di Desa Bakaran terbagi menjadi dua wilayah yaitu Bakaran Kulon dan Bakaran Wetan, dan paling banyak produksi berada di Bakaran Kulon. Di Bakaran Kulon UMKM yang masuk di data base Dinas

Koperasi dan UMKM dengan Omset Tinggi dan berkembang tahun 2019 ada Adisa Batik dan Misih Batik dengan Omset 350 juta per tahun, sudah dipasarkan secara nasional, sedangkan Bakaran Wetan ada Batik Condro Kirono dengan Omset 110 juta per tahun juga sudah dipasarkan nasional.

UMKM batik dengan omset yang cukup besar di wilayah Bakaran Kulon ada Ibu Juwati selaku pemilik Adisa Batik dan Ibu Misih selaku pemilik Batik Misih, dimana pada tahun 2019 telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Batik jadi yang sering di produksi adalah pakaian laki – laki. Salahsatu Harga jual batik bakaran bervariasi bisa ada 50 ribu sampai dengan jutaan rupiah tergantung kain yang di pesan, seperti mulai dari kain polos sampai dengan kain yang sudah jadi atau baju. Batik di modifikasi dibuat sebagai cinderamata atau aksesoris seperti masker, hijab, slayer, dan lain-lain. Harga cinderamata juga berbedabeda. Anak sekolah kebanyakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pati rata-rata setiap jumat mengenakan batik, salah satunya yang dipakai adalah batik bakaran, tentu setiap tahun para pengrajin atau UMKM kebanyakan pemesanan.

Produk Batik perlu sekali dijaga dan dilestarikan dimana merupakan kerajinan / seni yang menjadi warisan nusantara dan banyak makna budaya, filosofis, nilai etika serta estetika. Sekarang ragam batik bermuculan di tengah masyarakat. Kehadiran batik muncul kembali semenjak ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO sejak Jumat, 2 Oktober 2009, hal tersebut dijelaskan oleh Arina Ulfatul dalam *Godnews From Indonesia tahun*

2017 dengan *Judul Pesona Batik Pesisir Bakaran Khas Pati Jawa Tengah*. Yang melatarbelakangi ketetapan tersebut karena masyarakat semakin paham, sadar, dan mengerti pentingnya melestarikan budaya lokal khas Nusantara, termasuk batik. Permintaan pasar global yang mulai tertarik dengan batik mendukung ketetapan tersebut. Pada zaman sekarang, permintaan maupun pemesanan batik tidak menjadi kebutuhan orang tua, melainkan juga disukai kaum remaja. Peran dari pengrajin batik dibutuhkan sebagai peningkatan mutu, kualitas serta inovasi untuk kemajuan batik agar lebih mendunia lagi. Peningkatan kualitas serta keunikan batik saat ini dibuat dan dimodifikasi berdasarkan permintaan konsumen seperti halnya ragam ornamen yang ditambahkan. Banyak jenis batik yang mempunyai ragam corak serta warna yang khas, seperti batik Yogyakarta, Magetan, batik Pekalongan, batik mega mendung Cirebon, batik Solo, batik Sidomukti dan ada batik tulis khas Bakaran, Juwana, Jawa Tengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) batik juwana memiliki potensi untuk membuat batik bakaran sebagai penguat perekonomian.

UMKM memberikan kesempatan pada masyarakat yang menganggur untuk dapat bekerja karena menjadi lapangan pekerjaan. Dalam sistem kerjanya, pekerja yang dibutuhkan disini bisa sedikit, semakin banyak malah berkembang menjadi usaha besar. Berkembang atau tidak, membutuhkan bantuan dari beberapa pihak, salahsatunya pemerintah daerah masing-masing. Tertera pada UU No.20 Tahun 2008 yakni pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberdayaan UMKM yang ada di Indonesia. Sebagai

pemegang kekuasaan serta agen pemberdaya UMKM, harus dapat menjamin perkembangan UMKM di Indonesia, hal tersebut dikarenakan sekarang masih ada yang tumbuh dengan sendirinya tanpa ada campur tangan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pati berupaya untuk menjadikan batik Bakaran sebagai salah satu produk andalan Pati dengan beberapa kebijakannya. Batik Bakaran mempunyai ciri khas yang berbeda dibandingkan batik lainnya, seperti batik dari Pekalongan, Solo, ataupun Lasem karena abstrak. Batik Bakaran sudah didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dari 22 motif baru 9 diantaranya sudah didapatkan hak paten, untuk 13 motif yang lain belum, masih menunggu proses penelitian yang dijalankan di Indonesia. Dengan adanya hak paten, corak atau motif yang berasal dari Desa Bakaran tidak diakui oleh kabupaten dan negara lain. Website resmi pemerintah Kabupaten Pati menerangkan bahwa pematenan motif batik ini tidak dapat diatasnamakan perseorangan namun milik Pemerintah Kabupaten Pati. Alasan kenapa milik pemerintah kabupaten sebab batik bakaran ialah hasil kebudayaan masyarakat, dengan begitu masyarakat Kabupaten Pati dapat memproduksinya. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemerintah telah berusaha UMKM di Bakaran yang menjadi ciri khas dan asli buatan masyarakat Bakaran. Pada tahun 2019 Pemerintah dalam Peraturan Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, poinnya menganjurkan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya menggunakan batik khas Pati

yang menjadi bagian dari busana adat. Penggunaan pakaian adat digunakan hanya setiap pekan pertama setiap bulan di hari Jumat. Peraturan Bupati tersebut mulai diberlakukan mulai bulan Oktober 2019. Kebijakan ini selain untuk memperkenalkan batik Bakaran juga mendorong produktivitas UMKM Batik Bakaran agar lebih meningkat. UMKM batik bakaran secara tidak langsung sebelum bulan Oktober mendapat pemesanan baju adat pati. Kebijakan tersebut juga belum sepenuhnya efektif karena masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menerapkannya, terlebih pemakaiannya yang agak susah dan ruang gerak terbatas.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau DINKOPUMKM Kabupaten Pati adalah dinas yang menaungi UMKM dan Koperasi di daerah Pati. Dalam meningkatkan UMKM agar mampu manajemen dengan baik, pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2019 mengadakan acara pelatihan *business plan* serta menggandeng BDS menjadi mitra penyedia materi pelatihan. Berdasarkan kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam 5NEWS. CO.ID acara pelatihan ini menjadi program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau DINKOPUMKM Kabupaten Pati untuk memberdayakan UMKM. Selain pelatihan pada 4 sampai dengan 6 Agustus DINKOPUMKM juga mengadakan Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Melalui Pati Expo 2019, memfasilitasi melalui KuPat atau Komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pati. Pengambilan informasi maupun wawancara akan ditujukan kepada bapak Hendry

Kristyanto, SE.MM (Kepala Bidang UMKM), Bapak Sukino, SH (Seksi Pendataan dan Pemberdayaan UMKM), Tamzis Al Anas (Ketua Klaster Batik Pati dan Ketua Komunitas Batik Pati), Juwati (Pemilik “Adisa Batik”), Misih (Pemilik “Misih Batik”), dan Indah Lestari (Karyawan “Misih Batik”)

Pada tahun 2019 pemerintah kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019 mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 mengenai Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, yaitu menganjurkan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya menggunakan batik khas Pati yakni menjadi bagian dari busana adat, didukung dengan adanya UMKM yang mulai terbina oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu Misih Batik, terjadi peningkatan produktivitas batik Bakaran, dengan adanya penjelasan tersebut, maka peneliti berusaha ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM Produk Batik Bakaran Kabupaten Pati Tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, penulis membuat perumusan masalah antara lain:

- a. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019?

1.3 Tujuan

Tujuan diadakannya penelitian ini, di antaranya :

- a. Untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemda dalam menggerakkan UMKM batik Bakaran.

1.4 Manfaat

Berikut manfaat dengan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini memberi sumbangan konsep teoretis mengenai peran pemerintah daerah dalam peningkatan UMKM produk batik Bakaran Kabupaten Pati Tahun 2019 dan faktor pendukung serta penghambat Pemda untuk menggerakkan UMKM batik Bakaran. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai sarana menyalurkan gagasan, ide, serta pikiran guna menambah pengetahuan serta wawasan mengenai peran pemerintah daerah untuk meningkatkan UMKM produk batik Bakaran Kabupaten Pati. Bagi pihak aparatur, penelitian ini memberikan manfaat yakni tambahan informasi ataupun evaluasi mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran Kabupaten Pati.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian terkait peran pemerintah daerah untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produk batik Bakaran Kabupaten Pati dapat memberikan manfaat bagi pemerintah serta masyarakat. Manfaat untuk pemerintah ialah mengetahui evaluasi dari peran pemerintah

daerah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran di Kabupaten Pati. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu untuk menambah pengetahuan serta informasi terkait peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran Kabupaten Pati.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian terdahulu bertujuan menunjukkan seberapa berbeda penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian – penelitian yang sebelumnya. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, berkenaan dengan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM Produk batik Bakaran tahun 2019 belum ada yang meneliti, penelitian yang hampir serupa ada namun berbeda berbeda tahun dan fokus penelitian.

Rohmah, Kusuma, dan Rohilie (2017) meneliti tentang seperti apa upaya pemerintah yang dilakukan dalam usaha meningkatkan industri batik Bakaran di Kabupaten Pati dengan dengan program ekonomi kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa usaha pemerintah dalam meningkatkan Industri Batik Bakaran dengan lkasi di Kabupaten Pati yang mana menggunakan program ekonomi kreatif. Metode pendekatan kualitatif deskriptif ialah metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Berdasarkan pada hasil penulisan ini dapat ditarik simpulan yakni sesuai Intruksi Presiden No. 6 tahun 2009 yaitu mengenai pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009 – 2015. Ekonomi kreatif diperlukan sebagai sarana meningkatkan perekonomian dan memacu daya saing Batik Bakaran yang kuat serta

bermutu, dan terjamin dapat melakukan persaingan di tingkat nasional ataupun global. Penelitian ini berfokus pada Industri batik Bakaran dan ekonomi kreatif berbeda dengan UMKM.

Saputra (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bagaimana peran pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengembangan UMKM. Fokusnya pada pengolahan waluh yang digunakan untuk produk unggulan daerah, tepatnya di Kabupaten Semarang. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah mengembangkan UMKM yang mana produknya dapat menjadi produk unggulan daerah. Berisi mengenai peran pemerintah daerah sebagai aktor yang memimpin mampu mengembangkan UMKM, yaitu tentang pengolahan waluh yang digunakan untuk produk yang diunggulkan tepatnya berada di Kabupaten Semarang. Hasil Penelitian ini melihat dari bagaimana Peran Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan pada upaya mengembangkan UMKM pada pengolahan waluh sebaga salahsatu produk unggulan didaerahnya. Pembeda antara penelitian ini dengan yang lain yaitu objek penelitian serta teori yang digunakan.

Retnoningsih (2016) Bagaimana manajemen pemerintahan daerah sebagai pemimpin yang memberdayakan UMKM dengan produk carica dan berlokasi di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa manajemen yang dilakukan leh Pemerintahan daerah berupaya memberdayakan UMKM dengan fokus Produk Carica. Dalam melaksanakan penelitian, penulis memilih pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dari hasil penulisan ini maka ditarik

simpulan bahwa manajemen pemerintahan daerah memberdayakan UMKM Produk Carica adalah adanya fungsi manajemen, antara lain dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan serta mengawasi. Pada perencanaan pemerintah daerah melibatkan banyak pihak disini sudah berjalan dengan baik. Pengorganisasian belum menghasilkan koordinasi yang bagus sehingga masih belum baik karena masih adanya ego yang kuat dari masing – masing SKPD. Pengawasan masih belum samanya SOP yang digunakan oleh pengrajin. Pemberdayaan sudah dilakukan.

Arief Baktiar (2016) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa Peran Pemerintah Daerah disana untuk usaha peningkatan Umk Buruh Rokok di Pr. Nojorono Kabupaten Kudus. Metode pendekatan pada penelitian tersebut yaitu pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Berdasarkan pada hasil penulisan ini pemerintah telah menetapkan perlindungan hukum tentang pengupahan. Perlindungan hukum tersebut tertera pada pasal 88 hingga pasal 98 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Upah Minimum. Jika dilihat sudah ada bentuk perlindungan hukum terhadap pengupahan, akan tetapi dalam segi penerapannya di lapangan masih ditemukan beberapa pihak yang belum taat aturan. Pada saat menetapkan Upah Minimum sudah semestinya kepentingan perusahaan serta pekerja ataupun buruh sama-sama memperoleh keadilan dalam hal perlindungan.

Rotua Kristin S dan Rudi Salam S (2016) Meneliti tentang bagaimana peranan pemerintah daerah dimana sebagai pemimpin daerah meningkatkan Pariwisata Alam dan Budaya yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif digunakan pada penelitian ini. Hasilnya ada tiga peran Dinas Kebudayaan Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara diantaranya 1) bertindak sebagai fasilitator, Dinas Pariwisata berperan melakukan penyediaan fasilitas sarana prasarana terhadap objek wisata, memfasilitasi investor serta pengusaha pariwisata baik berbentuk peraturan atau kebijakan yang memberikan perlindungan serta keuntungan, melakukan pemasaran objek pariwisata, memberikan fasilitas kelompok masyarakat sadar wisata supaya memperoleh pendanaan serta kegiatan fasilitator lainnya. Adanya fasilitas yang diberikan tersebut penting bagi pengusaha serta investor wisata di Kabupaten Tapanuli Utara untuk pengembangan usaha yang optimal, dengan demikian perkembangan objek wisata dapat berjalan dengan baik.

Dibandingkan dengan beberapa penelitian yang rata-rata hampir serupa dengan yang akan dilakukan peneliti, yakni membahas mengenai peran pemerintah daerah maupun peningkatan atau pengembangan suatu produk. Pada penelitian ini akan meneliti “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan UMKM Produk Batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019” judul ini mengarah kepada bagaimana peranan pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan meningkatkan UMKM khususnya produk batik Bakaran yang mempunyai ciri khas, selain itu juga untuk mengetahui faktor

pendorong dan penghambat pemda dalam meningkatkan UMKM. Penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti yang lain, dikarenakan berbeda tempat penelitiannya dan objeknya. Novelty atau kebaruan penelitian yang akan ditulis ini mengambil daerah Kabupaten Pati untuk dilakukan penelitian, dengan objeknya Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Pati mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM batik Bakaran yang mempunyai ciri khas daerah. Untuk peran pemerintah mengenai peningkatan UMKM Produk batik Bakaran belum ada yang melakukan penelitian serta belum diketahui seperti apa pada tahun. Sedangkan untuk waktu yang diambil adalah pada tahun 2019. Kebaruan dalam penelitian ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melakukan promosi dengan menerapkan pemakaian produk batik bakaran untuk meningkatkan popularitas produk. Pemerintah berusaha mengawal batik Bakaran menjadi batik terkenal guna meningkatkan UMKM produk batik Bakaran menerima pesanan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai peran yaitu melakukan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Pemerintah daerah harus mengayomi, melayani masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga dapat makmur.

Pemerintah Dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Owen E Hughes (1994) , paling tidak pemerintah mempunyai tiga peran

yaitu:

1. Peran Pengaturan (Regulasi)

Peran pengaturan merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salahsatu fungsinya membuat peraturan perundang-undangan.

2. Peran Pemberdayaan

Peran pemberdayaan ini fungsi yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan. Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang. Namun tentu saja pemberdayaan ini harus dimulai dari atas. Untuk memberdayakan masyarakat aparat pemerintah harus diberdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik, hukum, ekonomi dari aparat pemerintah perlu dimantapkan terlebih dahulu, sehingga pemerintah dapat memberdayakan masyarakat. Karena upaya pemberdayaan ini tidak lepas dari aspek keteladanan pemerintah itu sendiri.

3. Peran Pelayanan

Peran pelayanan ini merupakan fungsi yang menyangkut kebutuhan

msayarakat banyak, tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besar imbalan yang mampu diberikan. Peran pelayanan ini terdiri dari beberapa hal antara lain menjamin keamanan negara,memelihara ketertiban, menjamin penerapan keadilan, pekerjaan umum dan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan sosial, menetapkan kebijakan ekonomi. Memelihara sumberdaya dan lingkungan.

Pemerintah dalam perannya meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional, salah satunya dengan cara meningkatkan Usaha Mikrro, Kecil, dan Menengah karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

Menurut Diva terdapat peran pemerintah yang efektif dalam mengembangkan UMKM antara lain :

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah daat berupa pelatihan , pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berua keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

2. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam

mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investigasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan berjalan dengan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini , pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Keduanya memiliki wewenang sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

3. Pemerintah Sebagai Katalisator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat terjadinya suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses pengembangan dari UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti memberikan penghargaan, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM (Gede

Diva,2009:15).

1.6.2 Karakteristik UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah kelompok usaha yang mempunyai jumlah cukup besar karena terbentuk dari masyarakat. Kelompok tersebut tahan akan goncangan berupa masalah ekonomi, untuk itu telah menjadi kewajiban dalam menguatkan kelompok UMKM yang didalamnya banyak keterlibatan dari pihak-pihak, serta pemerintah. Adapun klasifikasi UMKM diantaranya :

1. *Livelihood Activities,*

yaitu UMKM yang digunakan untuk kesempatan kerja yang bertujuan untuk mencari nafkah, atau biasanya dikenal sektor informal, seperti pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise,*

yaitu UMKM yang sifatnya sebagai pengrajin akan tetapi belum mempunyai sifat wirausaha.

3. *Small Dynamic Enterprise,*

yaitu UMKM yang mempunyai jiwa wirausaha serta bisa menerima pekerjaan ekspor ataupun subkontrak.

UMKM mempunyai peran yang penting pada proses pembangunan serta perkembangan ekonomi, diantaranya di negara berkembang, dan negara maju. UMKM bagi negara maju, tidak hanya menyerap tenaga kerja namun juga usaha besar, demikian pada negara berkembang. Akan tetapi, kontribusi dalam membentuk atau menumbuhkan produk

domestik bruto dibutuhkan lebih banyak daripada kontribusi yang berasal dari usaha besar (Resalawati (2011:31).

1.6.3 Pembinaan UMKM

Menurut Asy'arie (1994) adapun program pembinaan UMKM yang dapat dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan antara lain :

1. **Pelatihan Usaha**

Melalui pelatihan ini, setiap pelaku UMKM diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan berbagai macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya.

2. **Pendampingan**

Pada tahap ini, yaitu ketika usaha dijalankan maka pelaku UMKM akan didampingi oleh tenaga pendamping yang sudah profesional, yang berfungsi sebagai pengarah maupun pembimbing, sehingga usaha yang dijalankan mampu berhasil digelutinya, dan benar benar mampu dikuasainya, memungkinkan diadakan usaha-usaha pengembangan.

3. **Jaringan Bisnis**

Dengan melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, rasanya untuk melanjutkan wirausaha yang sejati, permasalahan hanya soal waktu saja. Semua orang pada dasarnya dapat menjadi wirausaha, dan semakin banyak warga menjadi wirausaha, maka ketahanan suatu bangsa akan

memperoleh dasar pijakan yang kokoh.

1.7 Operasional Konsep

Penelitian ini variabel - variabelnya membentuk suatu tatanan konsep, dalam konsep tersebut melihat variabel, seperti apa peran maupun upaya pemerintah daerah lakukan guna meningkatkan UMKM batik Bakaran. Konsep peran pemerintah digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Peran pemerintah terdiri dari peran pengaturan (regulasi), peran pemberdayaan, dan peran pelayanan. Upaya yang dimaksud dari dampak peran pemerintah daerah ini yaitu bagaimana dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran. UMKM produk batik Bakaran sendiri mempunyai potensi karena merupakan khas daerah Pati. Adapun peran pemerintah yang efektif dalam mengembangkan UMKM yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai regulator, dan peran pemerintah sebagai katalisator.

Pemerintah daerah mempunyai peran menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri dengan baik, karena pemimpin suatu daerah mempunyai kewajiban mengayomi dan melayani masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerahnya sesuai dengan otonomi daerah. UMKM batik Bakaran merupakan salahsatu yang perlu ditingkatkan karena menjaga ciri khas batik Pati, yaitu batik Bakaran. Selain menjaga agar batik tidak hilang, peningkatan UMKM secara tidak langsung mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dikatakan kelompok usaha yang mempunyai jumlah besar karena terbentuk dari masyarakat sendiri dan tahan krisis ekonomi sehingga menjadi keharusan penguatan UMKM perlu pemerintah daerah perhatikan, salah satunya UMKM produk batik Bakaran.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Moleong (2005:6) memberikan pengertian penelitian kualitatif yang mempunyai arah untuk memberikan pemahaman terhadap kejadian mengenai sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, persepsi tindakan, perilaku dan lainnya secara holistic, dideskripsi berbentuk kata-kata maupun bahasa, dengan menggunakan bermacam metode alamiah.

Jenis pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian yang memakai data dalam bentuk gambar ataupun kata-kata bukan berbentuk angka disebut penelitian kualitatif. Data yang berasal dari rekaman, foto serta catatan yang didapatkan dari literatur menjadi diketahui kaitannya dengan informasi tentang objek yang akan dibahas (Semi, 1993:24).

Sedangkan jenis penelitian yang dipilih peneliti adalah deskriptif-analitis yang hanya melukis, menjelaskan, menulis, serta memberikan

pelaporan kondisi suatu objek ataupun suatu adanya fakta peristiwa serta berwujud pengungkatan fakta (Suharsimi, 2006:239).

Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan dan memaparkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, menggunakan bentuk deskripsi dengan fakta fakta yang telah diperoleh.

1.8.2 Subjek Penelitian

Ruang Lingkup atau subjek dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Mendalami apa yang dilakukan oleh dinas terkait upaya dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran di Kabupaten Pati.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam menjalankan penelitian, penulis menggunakan jenis serta sumber data antara lain:

a) Jenis Data Primer

Data primer berbentuk hasil pengamatan dimana penulis turun langsung untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dari :

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati
2. UMKM batik Bakaran di Juwana Desa Bakaran (Ibu Misih "Misih Batik", Ibu Juwati "Adisa Batik", Pak Tamzis Al Annas "Yuliati Warno Batik")
3. Masyarakat oleh Indah Lestari karyawan "Misih Batik"

b) Jenis Data Sekunder

Data ini didapatkan dari berbagai sumber data yang bisa dijadikan penunjang penelitian seperti laporan penelitian sebelumnya, buku serta informasi yang diperoleh melalui pengaksesan media internet.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, serta studi kepustakaan.

a) Observasi

Observasi disebut juga pengamatan; “peninjauan secara cermat” (KBBI, 2008:976) mengenai suatu masalah ataupun objek. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pengamatan partisipasi, yakni pengamatan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati dengan cara menjadi mahasiswa magang (Kuliah Kerja Praktek) sehingga penulis dapat mengambil informasi dan mendapatkan akses untuk memperoleh data UMKM batik Bakaran.

b) Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan antara seseorang (pejabat atau yang lain) dengan maksud untuk dimintai keterangan ataupun pendapatnya tentang suatu hal, bertujuan agar termuat di surat kabar; tanya jawab penulis bersama narasumber (KBBI, 2008:1558). Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, antara lain :

- 1) Hendry Kristyanto, SE. MM (Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati)
- 2) Sukino, SH (Seksi Pendataan dan Pemberdayaan UMKM)
- 3) Tamzis Al Annas (Ketua Klaster Batik Pati dan Ketua Komunitas Batik Pati)
- 4) Ibu Misih (Pemilik “Misih Batik”)
- 5) Ibu Juwati (Pemilik “Adisa Batik”)
- 6) Indah Lestari (Masyarakat / Karyawan Misih Batik)

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah menemukan data baru berbentuk catatan kecil, jurnal, surat kabar, buku dan yang lainnya sebagai acuan dalam pencaharian informasi mengenai penelitian . Penulis mengumpulkan data-data yang di publikasikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Data Base UMKM 2019/2020 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Laporan Kerja Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Keputusan Bupati Nomor : 050 / 1831 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2019.

1.8.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian digunakan teknik triangulasi, yaitu melakukan pengecekan keabsahan data. Triangulasi sebagai teknik dalam memeriksa keabsahan suatu data dengan menggunakan sesuatu yang di luar data untuk mengecek data tersebut dengan pembandingnya (Moleong, 2012:330).

Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode pada penelitian ini. Patton dalam Moleong (2012:330) memberikan arti triangulasi sumber yaitu melakukan pemeriksaan atau perbandingan suatu informasi yang didapatkan dengan alat serta waktu yang berbeda pada penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis melihat dan membandingkan data yang diperoleh dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi kemudian dianalisis. Triangulasi tersebut digunakan guna mendapatkan informasi dari narasumber maupun data dari dinas sebagai alat pembandingan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh sehingga dapat dicapai derajat kepercayaan yang valid.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan Bogdan, suatu pencarian serta penyusunan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, wawancara serta bahan lainnya, tujuannya agar didapatkan kemudahan dalam memahami, serta diperolehnya informasi yang bisa disebarluaskan kepada khalayak banyak disebut dengan analisis data (Sugiyono, 2012:244).

Analisis penelitian ini berdasarkan Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan ketika proses pengumpulan data. Peneliti akan menganalisis jawaban dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Jika dari jawaban yang diperoleh belum memuaskan, selanjutnya peneliti akan memberikan pertanyaan lanjut sampai didapatkan data yang terpercaya (kredibel). Proses analisis data dilaksanakan berkelanjutan sehingga timbul keinteraktifan narasumber dengan peneliti.

Berdasarkan Miles dan Huberman, tahapan dalam menganalisis data antara lain pereduksian data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012:253).

a) Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, UMKM batik Bakaran dan Masyarakat/Karyawan misih batik, mengumpulkan informasi mengenai peran pemerintah meningkatkan UMKM produk batik Bakaran tahun 2019.

b) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data dengan cara membuat catatan atau rangkuman dari data yang diperoleh, lalu merangkum menentukan pokok, melakukan pemfokusan pada hal penting, setelah itu dijabarkan dan dianalisis.

c) *Data Display* (Penyajian Data)

Data pada penelitian ini disajikan dengan bentuk deksripsi serta uraian. Data yang sudah didapatkan peneliti dideskripsikan serta diuraikan sesuai dengan data yang sudah ada.

d) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Menurut Sugiyono (2012:253), simpulan awal dari hasil penelitian yang sifatnya sementara, dan bisa berubah apabila didapatkan data atau bukti pendukung pada tahap selanjutnya atau pengumpulan data. Namun, jika simpulan tersebut telah dilengkapi dengan data yang konsisten serta valid saat terjun ke lapangan guna pengumpulan data, maka dianggap

simpulan tersebut telah kredibel. Pada peneltian ini, setelah data – data didapatkan, diolah kemudian dianalisis maka ditarik kesimpulan untuk tahapan akhirnya.